

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Jawa Tengah sebagai salah satu Propinsi di Jawa, letaknya diapit oleh dua Propinsi besar, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Terletak antara 5o40' dan 8o30' Lintang Selatan dan antara 108o30' dan 111o30' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 263 Km dan dari Utara ke Selatan 226 Km (tidak termasuk pulau Karimunjawa).

Luas Wilayah Jawa Tengah sebesar 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas pulau Jawa (1,70 persen luas Indonesia). Luas yang ada terdiri dari 1,00 juta hektar (30,80 persen) lahan sawah dan 2,25 juta hektar (69,20 persen) bukan lahan sawah. Menurut penggunaannya, luas lahan sawah terbesar berpengairan teknis (38,26 persen), selainnya berpengairan setengah teknis, tadah hujan dan lain-lain. Dengan teknik irigasi yang baik, potensi lahan sawah yang dapat ditanami padi lebih dari dua kali sebesar 69,56 persen. Berikutnya lahan kering yang dipakai untuk tegalan/kebun/ladang/huma sebesar 34,36 persen dari total bukan lahan sawah. Persentase tersebut merupakan yang terbesar, dibandingkan persentase penggunaan bukan lahan sawah yang lain.

Adapun batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan : Laut Jawa
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan : Jawa Timur
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Daerah Istimewah Yogyakarta
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan : Jawa Barat

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah adalah 39.298.765 jiwa terdiri atas 19.281.140 laki-laki dan 19.989.547 perempuan. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kabupaten Brebes (2,342 juta jiwa), Kabupaten Cilacap (2,227 juta jiwa), dan Kabupaten Banyumas (1,953 juta jiwa).

Sebaran penduduk umumnya terkonsentrasi di pusat-pusat kota, baik kabupaten ataupun kota. Kawasan permukiman yang cukup padat berada di daerah Semarang Raya (termasuk Ungaran dan sebagian wilayah Kabupaten Demak dan Kendal), daerah Salatiga Raya (termasuk wilayah Ambarawa, Bringin, Kopeng, Tengaran dan Suruh), Solo Raya (termasuk sebagian wilayah Kabupaten Karanganyar, Sukoharjo, dan Boyolali), serta Tegal-Brebes-Slawi.

Pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,67% per tahun. Pertumbuhan penduduk tertinggi berada di Kabupaten Demak (1,5% per tahun), sedang yang terendah adalah Kota Pekalongan (0,09% per tahun). Dari jumlah penduduk ini, 47% di antaranya merupakan angkatan kerja. Mata pencaharian paling banyak adalah di sektor pertanian (42,34%), diikuti dengan perdagangan (20,91), industri (15,71%), dan jasa (10,98%).

B. Gambaran Umum Variabel Operasional

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi dapat diukur dengan kenaikan PDRB atas harga dasar konstan disetiap daerah. PDRB atau pertumbuhan ekonomi dilihat dengan membandingkan PDRB pada tahun yang sedang berjalan dikurangi PDRB tahun sebelumnya. Berikut ini tabel 4.1 menunjukkan tentang pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017.

Tabel 4. 1
Pertumbuhan Ekonomi (dalam persen)
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017

Kab/Kota	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Banyumas	6.97	5.67	6.12	6.05	6.34
Kebumen	4.57	5.79	6.28	4.99	4.89
Wonosobo	4.00	4.78	4.67	5.13	3.16
Klaten	5.96	5.84	5.30	5.14	5.07
Pemalang	5.57	5.52	5.58	5.38	5.39
KotaPekalongan	5.91	5.48	5.00	5.36	5.32

Sumber: Data Sekunder diolah

Dari tabel diatas menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017 tersebut masih fluktuatif. Pada Kab. Banyumas pertumbuhan tertinggi yakni pada tahun 2013 dan terendah pada tahun 2014. Pada Kab. Kebumen pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2015 dan terendah pada tahun 2013. Pada Kab. Wonosobo pertumbuhan ekonomi tertinggi yakni pada tahun 2016 dan terendah pada tahun 2017. Pada Kab. Klaten pertumbuhan ekonomi tertinggi yakni pada tahun 2013 dan terendah pada tahun 2017. Pada Kab. Pemalang pertumbuhan ekonomi tertinggi ada pada tahun 2015

dan terendah pada tahun 2016. Pada Kota Pekalongan pertumbuhan ekonomi tertinggi yakni pada tahun 2013 dan terendah pada tahun 2015. Jika dibandingkan keseluruhan Kabupaten/Kota tersebut pertumbuhan ekonomi tertinggi ada pada Kab. Banyumas sebesar 6.97 persen pada tahun 2013. Sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah ada pada Kab. Wonosobo pada tahun 2017 sebesar 3.16 persen.

2. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang kemudian dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Jika semakin tinggi rasio efektivitas, artinya kinerja keuangan daerah semakin makin baik dalam efektivitas Pendapatan Asli Daerah. Berikut ini Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017 terdapat pada tabel 4.2.

Tabel 4. 2
Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (dalam persen)
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017

No.	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kab. Banyumas	114.25	115.26	111.23	109.27	108.52
2	Kab. Kebumen	112.65	147.98	110.60	106.51	101.43
3	Kab. Wonosobo	129.34	138.33	118.18	112.33	108.51
4	Kab. Klaten	134.90	116.25	113.15	110.06	110.52
5	Kab. Pemasang	116.37	122.02	110.21	111.67	105.07
6	Kota Pekalongan	121.73	125.02	97.75	100.35	97.17

Sumber: Data Sekunder diolah

Dari tabel 4.2 dapat diketahui bahwa Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki presentase

yang berbeda-beda. Dari 6 Kabupaten/Kota tersebut yang memiliki Rasio Efektivitas PAD terbesar pada tahun 2013-2017 adalah Kabupaten Kebumen pada tahun 2014 dengan persentase sebesar 147,98 persen. Sedangkan yang terkecil dimiliki oleh kota pekalongan pada 2017 dengan persentase 97,17 persen. Bila di dilihat dari keseluruhan Rasio Efektivitas PAD Kabupaten/Kota tersebut, maka rata-rata sudah masuk dalam kriteria kinerja keuangan daerah yang sangat efektif karena kebanyakan nilai persentasenya lebih dari 100 persen hanya kota pekalongan pada tahun 2015 dan 2017 yang masih dalam kriteria efektif.

3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi digunakan untuk melihat seberapa efisien menggunakan realisasi pendapatan daerah. Dalam melihat hal ini yaitu membandingkan total realisasi belanja daerah dengan realisasi pendapatan daerah. Kinerja keuangan daerah dinilai telah efisien apabila memiliki hasil persentase kurang dari 100 persen.

Tabel 4. 3
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (dalam persen)
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017

No.	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Kab. Banyumas	99.04	95.86	83.97	84.68	80.55
2.	Kab. Kebumen	95.18	96.92	87.40	87.62	77.89
3.	Kab. Wonosobo	86.36	95.55	104.35	102.76	78.05
4.	Kab. Klaten	93.43	98.14	83.00	79.01	71.55
5.	Kab. Pemalang	99.35	95.76	90.42	87.24	80.61
6.	Kota Pekalongan	98.34	96.68	97.88	101.36	100.90

Sumber : Data sekunder diolah

Dari tabel 4.3 dapat diketahui bahwa Rasio Efisiensi Keuangan Daerah memiliki persentase yang berbeda-beda setiap tahun dan daerah. Dari 6

Kabupaten/Kota tersebut yang Rasio Efisiensi Keuangan Daerahnya paling efisien pada tahun 2013-2017 adalah Kabupaten Klaten pada tahun 2017 dengan persentase 71.55 persen. Sedangkan yang paling tidak efisien adalah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2015 dengan persentase 104.35 persen. Jika dilihat keseluruhan rasio efisiensi keuangan daerah Kabupaten/Kota tersebut rata-rata sudah cukup Efisien karena lebih dari 90 persen.

4. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini menunjukkan seberapa besar kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri aktivitas pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah ditambah total Pendapatan Transfer yang berasal dari antara lain : Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman (Abdul Halim, 2007).

Tabel 4. 4
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (dalam persen)
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017

No.	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kab. Banyumas	16.93	23.91	24.70	24.05	25.95
2	Kab. Kebumen	8.79	14.04	11.90	12.59	19.59
3	Kab. Wonosobo	9.68	15.54	14.68	14.59	17.95
4	Kab. Klaten	7.30	10.21	10.16	12.52	19.54
5	Kab. Pemalang	10.41	15.22	13.34	15.07	22.20
6	Kota Pekalongan	16.92	18.90	18.78	26.38	26.52

Sumber : Data Sekunder diolah

Dari tabel 4.4 dapat diketahui bahwa Rasio Kemandirian Keuangan disetiap daerah berbeda-beda. Kabupaten/Kota tersebut yang memiliki rasio

kemandirian keuangan daerah terendah tahun 2013-2017 adalah Kabupaten Klaten pada tahun 2013. Sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki rasio kemandirian tertinggi yaitu Kota Pekalongan pada tahun 2017. Jika dilihat rasio kemandirian keuangan daerah keseluruhan kabupaten/kota tersebut maka rata-rata memiliki pola hubungan Instruktif karena kurang dari 25 persen, artinya Kabupaten/Kota tersebut masih belum bisa melaksanakan otonomi daerah secara maksimal dan peranan pemerintah pusat masih dominan dalam membiayai daerah.

5. Rasio Belanja Operasi

Rasio ini menunjukkan laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Untuk mengetahui rasio belanja operasi yaitu dengan membandingkan antara Total Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah. Pada umumnya proporsi Belanja Operasi lebih mendominasi total belanja daerah, sekitar antara 60-90 persen.

Tabel 4. 5
Rasio Belanja Operasi (dalam persen)
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017

No.	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kab. Banyumas	84.46	83.72	83.72	83.38	81.73
2	Kab. Kebumen	76.97	71.36	76.97	71.50	79.41
3	Kab. Wonosobo	66.52	58.24	58.95	62.10	77.94
4	Kab. Klaten	88.37	72.80	83.07	87.62	80.24
5	Kab. Pemasang	83.03	89.80	84.92	86.62	82.16
6	Kota Pekalongan	80.00	78.24	47.94	41.87	35.50

Sumber : Data Sekunder diolah

Dari tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa Rasio Belanja Operasi setiap daerah berbeda-beda. Kabupaten/Kota yang memiliki Rasio Belanja Operasi terendah pada tahun 2013-2017 adalah Kota Pekalongan dengan 35.50 persen.

sedangkan yang paling tinggi yaitu Kabupaten Klaten dengan 88.37 persen pada tahun 2013. Jika dilihat dari keseluruhan Kabupaten/Kota tersebut maka rata-rata memprioritaskan Belanja Operasinya lebih dari 70 persen dan sudah menjadi kebanyakan tiap daerah. Namun, Kabupaten Wobonosobo dan Kota Pekalongan rata-rata rasio belanja operasinya kurang dari 70 persen.

6. Rasio Belanja Modal

Rasio ini menunjukkan laporan porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Untuk mengetahui Rasio Belanja Modal yaitu dengan membandingkan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Pada umumnya proposi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5-20 persen (Mahmudi 2010:164).

Tabel 4. 6
Rasio Belanja Modal (dalam persen)
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017

No.	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Kab. Banyumas	15.52	16.28	16.28	16.59	18.21
2	Kab. Kebumen	18.54	24.43	23.03	28.45	20.52
3	Kab. Wonosobo	33.48	41.76	41.05	37.90	21.78
4	Kab. Klaten	11.52	27.20	16.93	12.37	19.76
5	Kab. Pemasang	16.92	10.17	15.06	13.35	17.72
6	Kota Pekalongan	19.77	21.60	52.06	58.13	64.50

Sumber : Data Sekunder diolah

Kabupaten/Kota yang memiliki rasio belanja modal terendah tahun 2013-2017 adalah Kabupaten Pemasang di tahun 2014. Sedangkan rasio belanja modal paling tinggi pada Kota Pekalongan pada tahun 2017 sebesar 64.50 persen.